

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Turki dan Israel tercatat memiliki hubungan diplomatik yang cukup intens, hubungan diplomatik ini telah terjalin kurang lebih 67 Tahun terhitung sejak tahun 1949 (Işık 2016). Namun sejak berkuasanya *Justice and Development Parti* atau Adalet ve Kalkınma Partisi (*AK Parti*) yang berhaluan politik lebih dekat ke Islamis, hubungan tersebut mulai renggang. Bahkan pada 29 Januari 2009 dalam World Economic Forum di Davos, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan meninggalkan forum setelah mengecam Presiden Israel Shimon Peres atas serangan Israel ke Gaza pada Desember 2008 hingga Januari 2009 (The Guardian 2016). Di tengah tegangnya hubungan antara Turki dan Israel, pada tanggal 31 Mei 2010 terjadi sebuah serangan dari angkatan laut Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang berbendera Turki yang membawa relawan kemanusiaan dari seluruh dunia yang akan menyalurkan bantuan ke Gaza. Serangan tersebut melukai 50 relawan dan menewaskan setidaknya 9 relawan yang 8 diantaranya adalah warga negara Turki (The Guardian 2010). Sontak serangan tersebut membuat Turki geram kepada Israel dan kemudian mengusir Duta Besar Israel di Ankara dan menarik Duta Besar Turki di Tel Aviv.

Sejak insiden Mavi Marmara dan pengusiran Dubes Israel di Ankara, hubungan diplomatik Turki-Israel makin merenggang. Di berbagai forum Erdogan sering melakukan kecaman kepada Israel atas serangan dan pengusurannya terhadap Rakyat Palestina. Dan sebaliknya hubungan Turki dan Palestina semakin kuat, Turki terus memberikan dukungan baik bantuan kemanusiaan hingga dukungan kedekatan politik. *Harakah Al Muqawwamah Al Islamiyah* (HAMAS) , sebagai salah satu kelompok perlawanan di Palestina cukup dekat dengan *AK Parti* selaku partai penguasa Turki. Bahkan di Pemilu Turki , HAMAS seolah berkepentingan terhadap kemenangan *AK Parti*. Dalam kemenangan *AK Parti* di Pemilu tahun 2012, HAMAS diwakili oleh Khaled Meshal dan Ismail Haniyeh

mengucapkan selamat ke Erdogan dan Ahmet Davutoglu, dan Erdogan pun berjanji akan membahas persoalan serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsha di forum G-20 (Al Monitor 2015). Bahkan melalui Deputy Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus, menyatakan bahwa dukungan Turki terhadap Palestina adalah dukungan yang bersifat permanen (The Jakarta Post 2015). Dengan agenda utama melindungi hak rakyat palestina dan memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina.

Secara politik hubungan Turki dan Israel tampak merenggang dan menajam, dan sebaliknya hubungan Turki dengan Palestina terutama HAMAS terus menguat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika secara politik Turki dan Israel mengalami ketegangan, justru aktivitas ekonominya dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data yang dirilis oleh TurkStat pada tahun 2014 tercatat arus perdagangan antara Turki dan Israel mencapai 5,6 Milyar USD (Press TV 2015). Meningkat pesat hingga 50% dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tampak tegang dihadapan kedua kepala negara baik Turki maupun Israel tampak tegang di hadapan publik namun kedua negara terus berupaya melakukan normalisasi hubungan diplomatik mereka, bahkan Presiden Erdogan sempat mengeluarkan statement bahwa Turki membutuhkan Israel (Antara News 2016).

Kemudian dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik Turki-Israel, Turki mengajukan tiga prasyarat, pertama permohonan maaf dari Israel, kedua pembayaran kompensasi untuk keluarga korban dan ketiga membuka blokade Gaza. Dan setelah dilakukan pertemuan antara Turki dan Israel, diantara kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Turki dengan Israel adalah, pertama Israel akan membayar kompensasi kepada keluarga korban tragedi mavi marmara sebesar 20 Juta US\$. Kedua mengembalikan kedua duta besar mereka. Ketiga menganulir tuntutan parlemen turki kepada tentara Israel yang terlibat dalam serangan Mavi Marmara. Keempat Turki akan membatasi Aktivitas HAMAS di Turki dan pada akhirnya kedua negara akan mendiskusikan Impor gas alam dari Israel menuju Eropa yang akan melalui Turki (Al Monitor 2015).

Perkembangan terakhir, Israel dan Turki mulai melunak. Israel satu per satu menyetujui prasyarat yang diajukan Turki mulai dari permohonan maaf, kompensasi untuk korban, sementara Turki juga mulai bersedia mengadakan pertemuan dengan Israel. Seperti yang dilaporkan oleh New York Times pada 18 Desember 2015 (New York Times 2015), Turki diwakili oleh Diplomat Senior Feridin Sinirlioglu dan Israel oleh penasehat kementerian nasional Yossi Cohen dan Joseph Ciechanover melakukan pertemuan di Swiss. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan kembali hubungan diplomatik Turki Israel yang telah memburuk sejak 2010. Salah satu poin yang dibicarakan adalah tentang Gas Alam, dua pemasok gas Turki - yang bersama-sama menjelaskan sebagian dari impor gas Turki - adalah Rusia dan Iran, kedua negara dengan Turki saat ini sedang dalam hubungan yang cukup tegang (Middle East Eye 2015).

Sementara untuk pembukan blokade Gaza Israel masih bersikukuh untuk tidak mengabulkannya dan Turki tetap bersikukuh untuk menuntutnya. Pernyataan terakhir disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin bahwa Turki tidak akan menghapus tuntutan kepada Israel untuk membuka blokade Gaza (Daily Mail 2014). Bahkan Ibrahim Kalin menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan-kesepakatan final hitam diatas putih apa yang harus dilakukan kedua negara untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya.

Turki terkesan sedang melakukan politik luar negeri yang ambivalen, dimana ada pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Yakni ketika hendak menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap mendukung kuat Palestina dengan menuntut dibukanya blokade Gaza yang merupakan basis politik HAMAS yang merupakan musuh Israel.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Turki menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menjelaskan motif dan tujuan Turki ketika di satu sisi menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel namun di sisi lain semakin mendukung Palestina. Dan secara khusus menjelaskan strategi apa yang hendak dijalankan oleh Turki dibalik normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

1.4 Tinjauan Pustaka

Arbel (2014) berpendapat, hubungan diplomatik Turki-Israel mengalami masa keemasan mulai tahun 1992 hingga tahun 2008. Pasca 2008 hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami tantangan yang serius dan cenderung melemah. Terlebih pasca tragedi mavi marmara kepercayaan antara kedua negara saling melemah. Turki melihat Israel mengkhianati berbagai upaya positif diplomasi yang dilakukan Turki, sementara Israel melihat bahwa misi Freedom Flotilla adalah dalam rangka penetrasi untuk mematahkan blokade angkatan laut Israel dan mengancam keamanan Israel. Dan Arbel menjelaskan upaya-upaya Turki mendukung Palestina menjadi salah satu variabel yang membuat hubungan kedua negara makin melemah. Ditambah opini publik di kedua negara menunjukkan sentimen negatif berupa kemarahan satu sama lain. Selain itu berkuasanya *AK Parti* membuat Turki memasukkan Palestina sebagai salah satu agenda utama politik luar negerinya yang tentu membuat hubungan Turki dengan Israel semakin merenggang.

Senada dengan Dan Arbel, Carol Migdalovits (2013) melihat ketegangan hubungan Turki-Israel dikarenakan perbedaan kepentingan terhadap Gaza. Israel melakukan blokade terhadap Gaza karena kemenangan HAMAS di Pemilu Palestina, sementara Turki disinyalir sengaja mengirimkan armada kemanusiaan ke Gaza untuk membuka blokade tersebut. Turki yang berada dibawah pemerintahan *AK Parti* yang notabene dekat dengan HAMAS disebut ikut serta mendukung lembaga kemanusiaan IHH dengan mempersiapkan Kapal Mavi Marmara. Ketika terjadi penyerangan dan korban jiwa berjatuhan, Turki dianggap

memanfaatkan retorika Anti-Israel untuk memperoleh pengaruh regional di Timur Tengah bahkan untuk kepentingan PEMILU Turki mengingat opini publik Turki sangat pro-Palestina.

Sementara Ozlem Tür (2012) melihat menyatakan untuk menganalisis melemahnya Hubungan Diplomatik Turki Israel tak bisa lepas dari dinamika hubungan Turki-Israel secara historis maupun geopolitik. Ozlem Tur melihat mulai pada tahun 1990 karena di regional mereka harus mewaspadaai tetangganya Suriah di selatan yang memperkuat militernya dengan menandatangani perjanjian militer dengan Yunani dan menguatnya isu pemberontakan Partai Kurdi, Turki melakukan pendekatan terhadap Israel. Pasca 1999, setelah ancaman dari Timur Tengah hilang, Turki kembali menormalisasi hubungannya dengan Timur Tengah yang otomatis melemahkan hubungannya dengan Israel. Kemudian tahun 2002 di Turki muncul kesadaran publik dan politik terhadap isu Palestina dengan kenaikan *AK Parti*, sedangkan hubungan dengan Israel melemah. Tahun 2004, hubungan kembali menguat karena ambisi Turki untuk menjadi mediator di Timur Tengah dan setahun kemudian Presiden Turki Abdullah Gul melakukan kunjungan, berlanjut ke perjanjian militer. Pada tahun 2006 Turki menyambut kemenangan HAMAS dan membuat Israel meradang. Namun pada tahun 2008 Presiden dan Perdana Menteri Israel melakukan kunjungan ke Ankara yang membuat semakin menguatnya hubungan diplomatik Turki-Israel dengan berbagai kesepakatan kerjasama. Namun hubungan yang menguat itu diperburuk dengan kecaman Erdogan kepada Presiden Shimon Peres di World Economic Forum pada tahun 2009, diperparah dengan serangan Israel ke Armada kemanusiaan Freedom Flotilla yang menewaskan 8 orang warga negara Turki.

Dari ketiga penulis yang meneliti hubungan Turki-Israel terutama berangkat dari serangan Mavi Marmara setidaknya terdapat kesimpulan bahwa dukungan Turki terhadap Palestina menjadi variabel utama tarik ulur hubungan diplomatik Turki dengan Israel. Hal ini didorong oleh faktor domestik yakni, pertama, berkuasanya *AK Parti* yang secara ideologi dekat dengan HAMAS yang

merupakan musuh Israel. Kedua didorong oleh opini publik Turki yang sangat Pro Palestina.

Jika ketiga penelitian diatas melihat dukungan Turki terhadap Palestina sebagai variabel utama melemahnya hubungan diplomatiknya dengan Israel. Maka dalam rangka *filling the gap* dari penelitian di atas, penulis hendak meneliti kondisi dimana Turki berusaha menjalin komunikasi kembali dengan Israel untuk memperkuat hubungan diplomatiknya, namun juga tetap mendukung Palestina. Penulis melihat hal ini menarik untuk diteliti karena hubungan Turki dengan Israel dan hubungan Turki dan Palestina terutama HAMAS adalah dua hal yang ambivalen dan saling bertentangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada konsekuensi logis terhadap hubungan Turki dengan Israel jika tetap mendukung Palestina dan HAMAS, yakni melemahnya hubungan diplomatik kedua negara. Namun Turki justru berusaha untuk menguatkan kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel dengan tetap mendukung Palestina.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Analisis Historis

Halliday (2005) memberikan panduan dalam menganalisis hubungan internasional di Timur Tengah, hal ini karena Timur Tengah memiliki karakter yang khusus. Dalam menganalisis Timur Tengah diperlukan Analisis Historis, karena interaksi tiap negara memiliki sejarah, berulang dan terpola. Literatur tentang Hubungan Internasional tentang Timur Tengah salah satunya didominasi oleh bentuk naratif, yaitu, sejarah negara tertentu berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang fokus pada kegiatan diplomatik antar negara dalam jangka waktu tertentu. Menggunakan analisis historis dipandang lebih efektif mengingat kondisi Timur Tengah yang cukup kompleks. Selain itu dalam pandangan Halliday apa yang terjadi hari ini dan baru-baru ini sejatinya tidak dapat lepas tanpa mempertimbangkan masa lalu dan berbagai unsur-unsur masa lalu.

1.5.2 Teori Geostrategi

Geostrategi seperti yang didefinisikan oleh Grygiel (2006), adalah arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geo-strategi menjelaskan di mana negara harus mengkonsentrasikan upaya proyeksi militer dan mengarahkan kegiatan diplomatik. Sebuah negara mungkin memproyeksikan aktivitas politiknya ke suatu lokasi karena alasan ideologis, kelompok kepentingan, atau hanya kehendak dari pemimpin negara. Sebuah denominator umum dalam semua ini definisi adalah bahwa pendekatan geo-strategi hubungan internasional dari sudut pandang nasionalis dan biasanya pendukung strategi agresif dalam memajukan kepentingan mereka. Dalam mewujudkan kepentingan geostrategis mereka, suatu negara merencanakan dan menetapkan sarana untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan militer mereka. Atau juga dalam rangka ekspresi aspirasi hegemonik suatu sumber daya di luar negeri.

1.6 Hipotesis

Upaya Turki untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel terjadi karena kondisi geopolitik kawasan menuntut Turki menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai sekutu lama, sekaligus memainkan peran Turki sebagai kekuatan di regional dengan menjadi mediator konflik Palestina-Israel.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Geopolitik Kawasan

Menurut Cambridge Dictionary Geopolitik adalah aktivitas politik yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dari suatu Negara atau suatu kawasan di dunia. Sementara Geopolitik Kawasan menurut Nicholas Spykman adalah realitas fisik yang menjadi penentu dalam Hubungan Internasional.

1.7.2 Kekuatan Regional

Menurut Shaima Abdel Fattah (2015), kekuatan regional adalah Negara yang punya kapabilitas hardware berupa posisi geostrategis yang memungkinkan

melakukan manuver di skala regional hingga global menggunakan diplomasi yang berbasis pada multilateralisme, manajemen regional dan fasilitator dalam konflik regional dan internasional.

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Geopolitik Kawasan

Menurut Scholvin (2016) geopolitik kawasan tidak boleh dianggap sebagai sebuah nasib yang tak dapat diubah. Artinya ia adalah bagian struktur independen dari agensi yang diukur dengan seperangkat peluang dan kendala. Selain itu pola umum dan proses jangka panjang dapat dijelaskan dengan tepat oleh kondisi geografis, namun memahami fenomena spesifik yang terjadi dalam hubungan internasional memerlukan pertimbangan untuk melakukan intervensi faktor non-geografis. Artinya ukuran lainnya adalah proses dan intervensi factor-faktor non geografis seperti hubungan antara Negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang berkaitan dengan kepentingannya.

1.8.2 Kekuatan Regional

Menurut Joachim Betz dan Ian Taylor (2015), kekuatan regional memiliki kemampuan yang penting di kawasan namun tidak memiliki kemampuan dalam skala global. Maka ukuran dari kekuatan regional jika merujuk Konsorsium Riset Politik Eropa adalah dominasi di kawasan ini baik secara ekonomi maupun militer, dapat menggunakan pengaruh hegemonik di wilayah ini dan memiliki pengaruh yang besar terhadap skala dunia, serta diakui atau bahkan diterima sebagai pemimpin daerah oleh tetangganya.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terkait satu atau lebih variabel yang saling berhubungan. Tipe penelitian ini mencari hubungan sebab akibat. Adapun variabel yang dihubungkan adalah Kepentingan Nasional

19.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau studi literatur. Studi literatur adalah melakukan proses membaca, mengevaluasi untuk memperkaya definisi, kata kunci dan terminologi yang dapat menunjang pemahaman peneliti dan memahami topik permasalahan yang diangkat. Data dari penelitian ini didapat dari buku, laporn,artikel, media massa yang terkait dengan hubungan diplomatik Turki-Israel, dan dukungan Turki terhadap Palestina.

1.9.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang digunakan mayoritas berwujud kata-kata. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pemahaman dalam penarikan kesimpulan. Dalam teknik analisis kualitatif, interpretasi analisis penelitian merupakan interpretasi langsung peneliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

1.9.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Hal ini didasarkan pada peristiwa yang berhubungan dengan putusannya hubungan diplomatik Turki-Israel hingga mulai terjalin komunikasi untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara. Pada tahun 2010 terjadi penyerangan oleh Israel terhadap Armada Freedom Flotilla yang akan menembus Gaza yang menewaskan 8 orang warga negara Israel, dan sejak itu Turki mengusir Duta Besar Israel di Ankara dan menarik Duta Besarnya di Tel Aviv.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, elaborasi pembahasan permasalahan disusun melalui sistematika penulisan berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis serta metodologi penelitian

BAB II menjelaskan Hubungan diplomatik Turki dengan Israel, Turki dengan Palestina dan dinamikanya di masa pemerintahan *AK Parti*

BAB III menjelaskan Kondisi Geopolitik Kawasan dan Peran Turki di dalamnya

BAB IV Kesimpulan